

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Determinasi merupakan hal-hal yang menentukan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Determinasi biasa disebut juga sebagai hal-hal atau faktor-faktor yang menentukan atau menyebabkan suatu kejadian. Konteks penelitian ini, yaitu untuk mengetahui determinasi yang diantaranya adalah inflasi, upah minimum, dan tingkat kemiskinan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah.

Manusia pada dasarnya tidak mungkin bisa lepas dari kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Pengeluaran konsumsi akan terus melekat di diri manusia dari lahir hingga akhir hidupnya. Sepanjang hidup manusia pasti melakukan kegiatan konsumsi (Mananja, K. & Marta, J., 2024). Setiap manusia pada hakikatnya pasti terlahir dari keluarga dan akan membentuk sebuah rumah tangga. Pengeluaran konsumsi mereka artinya akan menjadi bernama pengeluaran konsumsi rumah tangga. Komponen pendorong terbesar dalam struktur PDB pada tingkat nasional maupun PDRB pada tingkat regional adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dampak signifikan yang dihasilkan yaitu terhadap kualitas hidup penduduk serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seiring dengan berjalannya waktu, pengeluaran konsumsi rumah tangga kini dapat dijadikan sebagai alat baru dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi (Y. Zhang et al, 2025). Pemahaman yang mendalam mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga saat ini penting

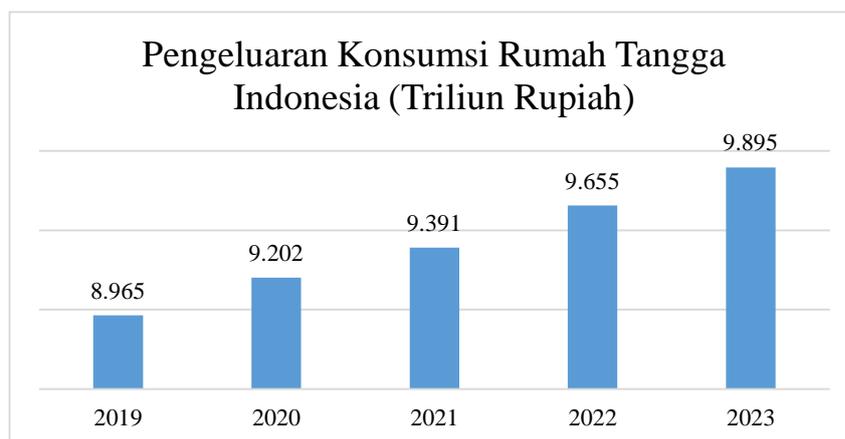
digunakan untuk pengambilan kebijakan yang efektif nantinya, sekaligus untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengukur berapa banyak atau besar pendapatan anggota keluarga untuk konsumsi jasa dan barang pada periode tertentu. Oleh karena itu, rumah tangga dalam hal ini adalah pemakai akhir (*final demand*) dari semua macam jasa serta barang di dalam sebuah perekonomian (M. Fajar et al, 2021). Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencerminkan bagaimana masyarakat mengelola dan mengalokasikan pendapatan mereka untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan, mulai dari primer hingga tersier. Jika kita lihat lebih mendalam mengenai pentingnya perhitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam konteks ekonomi makro, angka tersebut akan menggambarkan tentang tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika ada peningkatan dalam konsumsi rumah tangga, hal ini akan dapat menciptakan efek yang sangat luar biasa dalam mendorong pertumbuhan sektor produksi, misalnya bertambahnya lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya nanti akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Secara umum, pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pilar penting dalam struktur ekonomi Indonesia karena mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara. Bulan Ramadhan, Natal, Hari Raya Idul Fitri, dan lainnya seringkali mendorong adanya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dapat menumbuhkan perekonomian di Indonesia dimana dapat meningkatkan pengeluaran untuk makanan dan minuman serta transportasi. Namun perlu diingat kembali bahwa meskipun pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama perekonomian, ketergantungan yang tinggi pada sektor ini dapat menjadi

risiko dan tantangan tersendiri. Karena jika daya beli masyarakat sedang menurun, hal itu akan mengakibatkan turunnya pula pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada kuartal 1 tahun 2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54,93% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Itu menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga diandalkan hampir setengah dari perekonomian Indonesia. Berikut adalah grafik pengeluaran konsumsi rumah tangga 5 tahun terakhir pada tahun 2019-2023 di Indonesia.

Gambar 1. 1 Grafik Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Indonesia Tahun 2019-2023

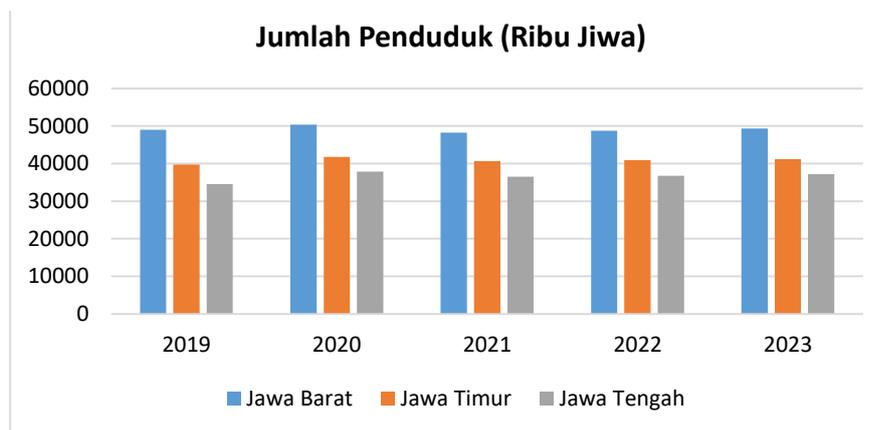


Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, diolah (2019-2023)

Gambar 1.1 yang disajikan di atas memberikan analisis awal pengeluaran konsumsi rumah tangga selama lima tahun terakhir di Indonesia. Data pengeluaran konsumsi rumah tangga menggambarkan bahwa ada lintasan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya di Indonesia. Peningkatan tersebut menandakan adanya peningkatan kondisi ekonomi di samping peningkatan daya beli masyarakat. Pada tahun 2019, pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 8.965.000.000.000 rupiah. Lalu pada tahun 2020, meskipun terjadi pandemic covid-

19, konsumsi masih tetap mengalami kenaikan dari 8.965.000.000.000 rupiah pada tahun 2019 lalu menjadi 9.202.000.000.000 rupiah pada tahun 2020. Adanya kenaikan ini mencerminkan ketahanan konsumsi yang baik oleh rumah tangga saat masa kritis. Kemudian laju pengeluaran terus naik pada tahun 2021 hingga 2023 yaitu 9.391, 9.655, dan 9.895 triliun rupiah. Pada tahun 2021-2023 merupakan fase pemulihan pasca pandemi dan terlihat bahwa konsumsi masyarakat tidak mengalami penurunan sama sekali yang berarti kebijakan ekonomi nasional yang diterapkan oleh pemerintah sangat efektif.

Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk di Pulau Jawa tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, diolah (2019-2023)

Seperti yang terlihat pada gambar 1.2 di atas, Jawa Tengah sering dianggap sebagai provinsi terpadat ketiga di Jawa, setelah Jawa Barat dan Jawa Timur dalam hal jumlah penduduk. Meskipun semua provinsi mengalami peningkatan jumlah penduduk tahunan yang stabil, termasuk tahun-tahun krusial antara 2019 dan 2023, Jawa Tengah tetap menjadi provinsi terpadat ketiga di Jawa, yang menunjukkan tingkat stabilitas demografi yang mengesankan dalam menghadapi perubahan yang dialami provinsi-provinsi tetangganya. Posisi yang konsisten ini menyoroti karakteristik demografi khas Jawa Tengah, yang menarik dan menampung

penduduk yang cukup besar, yang menyoroti signifikansi provinsi tersebut dalam lanskap sosial ekonomi yang lebih luas di kawasan tersebut.

Dalam konteks di Indonesia, jumlah agregat pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan gabungan dari semua provinsi. Pulau Jawa, yang dikenal sebagai wilayah dengan penduduk terpadat di Indonesia, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap fenomena ini. Jawa Tengah menempati peringkat ketiga provinsi dengan penduduk terpadat di skala nasional, serta termasuk yang terpadat, dengan luas wilayah mencapai 32.800,69 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 37,18 juta jiwa (BPS, 2023) tentunya mempunyai kontribusi yang lumayan besar pula dalam menyumbang pengeluaran konsumsi rumah tangga Indonesia (N. Sekar Harum et al. 2020). Provinsi berikut ini merupakan jumlah penduduk terbanyak yang ada di Pulau Jawa.

Selain itu, Jawa Tengah juga menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang dimana peningkatan pendapatan per kapita juga turut mendorong hal tersebut. Itu akan memberikan pengaruh yang baik pada pola konsumsi masyarakat, sehingga mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Disamping itu, sektor ekonomi yang dimiliki oleh Jawa Tengah mulai dari pertanian, industri, hingga jasa turut berperan penting dalam mendukung daya beli masyarakat. Meskipun demikian, penting untuk mengakui bahwa sektor-sektor tertentu memainkan peran penting dalam mendorong pengeluaran konsumsi rumah tangga secara keseluruhan, dengan penekanan khusus pada bidang transportasi dan komunikasi, bersamaan dengan kategori penting yaitu makanan dan minuman. Pengeluaran keuangan yang dialokasikan untuk sektor-sektor tertentu ini mendekati 50% dari total pengeluaran rumah tangga di wilayah Jawa Tengah. Konsentrasi pengeluaran yang menonjol ini

menyoroti tidak hanya kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari tetapi juga mencerminkan dinamika sosial ekonomi yang lebih luas yang memengaruhi perilaku konsumen dan pola pengeluaran di wilayah khusus ini.

Gambar 1. 3 Grafik Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah (2019-2023)

Berdasarkan gambar grafik 1.3, pengeluaran konsumsi rumah tangga Jawa Tengah menampilkan tren pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan sangat konsisten. Mulai dari tahun 2019 di angka 821948116,9 juta rupiah dan mencapai puncaknya di angka 1.033.374.616,91 juta rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan pada tahun 2019 ke tahun 2020 terlihat tidak cukup signifikan, dilihat dari batang grafik di atas yang hampir tidak ada perbedaannya. Itu dikarenakan terdapat wabah *covid-19* yang hampir melumpuhkan perekonomian global termasuk di Indonesia, lalu mengharuskan adanya *lockdown*. Meskipun demikian, dampak ekonomi dari adanya *covid-19* tidak berlangsung lama. Adanya keinginan masyarakat untuk dapat kembali keluar rumah dan belanja setelah ditiadakannya *lockdown* dan membaiknya kondisi kesehatan serta pelonggaran pembatasan sosial menjadikan perekonomian mulai membaik dan berkembang pesat, sehingga pada tahun 2021-

2023 pengeluaran konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan kenaikan yang lumayan signifikan.

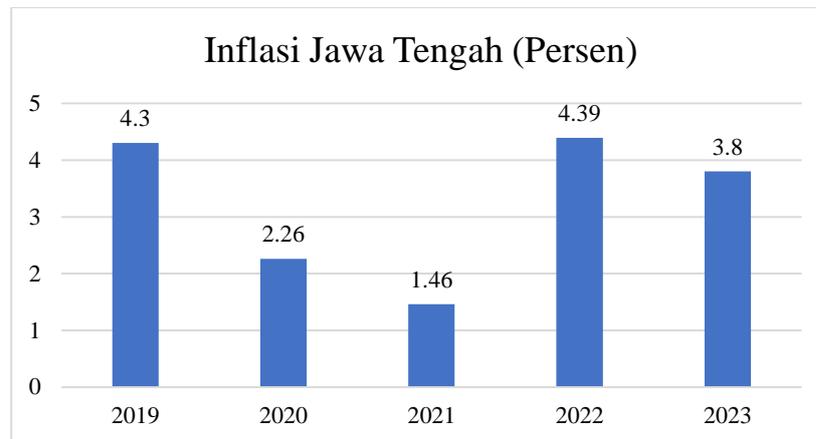
Beberapa strategi yang dilakukan Jawa Tengah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat telah dijelaskan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yaitu melalui sektor UMKM dengan melakukan terobosan yang dinamakan “nguripi”, yang artinya menghidupi sektor usaha kecil menengah. Terdapat dua program yang digunakan untuk mencapai keberhasilan terobosan tersebut. Program pertama yaitu melalui program Lapak Ganjar. Program ini memanfaatkan pengikut di media sosial Instagram @ganjar_pranowo yang mencapai 5,4 juta pengikut, jadi pengusaha kecil menengah dapat berkesempatan melakukan promosi gratis disitu. Hingga 25 Desember 2022, tercatat sekitar 2.000 lebih UMKM telah terbantu dengan adanya promosi gratis di media sosial tersebut.

Program selanjutnya adalah pendirian Hetero Space. Hetero Space yang dimaksud disini bukan hanya sekedar tempat kerja yang berfasilitas internet nirkabel, melainkan wadah bagi para pekerja yang sedang merintis usaha untuk berkumpul dan menyediakan tempat untuk berbagai pelatihan khususnya UMKM. Hetero Space telah memberikan dampak kepada 500 komunitas, 100 perusahaan, dan 15.000 UMKM, serta 2.500 *startup* yang telah mengikuti program. Selain itu, Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana mengatakan bahwa sektor ekonomi menunjukkan perbaikan juga mulai dari tingkat pengangguran dan kemiskinan yang turun. Dari data berdasarkan Sakernas 2022 yang dilaksanakan pada Februari dan Agustus 2022, tercatat pengangguran merosot sebanyak 44.000 orang dan orang yang bekerja naik sebanyak 555 ribu orang (jatengprov.go.id, 2022)

Terlepas dari besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia maupun di Jawa Tengah, tentunya suatu daerah juga pasti memiliki fenomena ekonomi yang sangat kompleks dan berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian daerah, yang disebabkan oleh naiknya sejumlah komoditas pangan dan non-pangan yang biasa disebut dengan inflasi. Inflasi mengacu pada kenaikan harga komoditas secara meluas, yang disebabkan oleh penurunan daya beli mata uang secara berkelanjutan selama durasi tertentu (Ahmad Soleh et al., 2023).

Di Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPS (Badan Pusat Statistik), Dadang Hadiwan menerangkan, jika dilihat dari sisi pengeluaran, inflasi pada April 2024 salah satunya dipengaruhi oleh transportasi, perawatan pribadi, dan jasa lainnya. Menurutnya juga, terdapat lima komoditas yang turut andil dalam menyumbang inflasi yaitu naiknya harga bawang merah, bawang putih, emas perhiasan, angkutan antarkota, dan minyak goreng. Kenaikan harga bawang merah dan putih tersebut disebabkan oleh faktor cuaca yang cukup ekstrim di Jawa Tengah baru-baru ini. Namun masalah itu juga bisa disebabkan oleh pengaruh pandemi *covid-19*, dimana mengakibatkan perekonomian semua wilayah di Indonesia merosot termasuk Jawa Tengah. Jika harga komoditas banyak yang naik sehingga terjadi inflasi, maka daya beli masyarakat akan menurun, terutama terhadap produk dalam negeri (Rizki, 2022). Oleh karena itu, pada individu atau rumah tangga yang mempunyai pendapatan rendah, kenaikan inflasi akan lebih berdampak dalam mengurangi tingkat konsumsi mereka dalam jangka pendek. Berikut adalah grafik inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2010-2023.

Gambar 1. 4 Grafik Inflasi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2019-2023)

Berdasarkan gambar 1.4 tersebut, pada tahun 2019, inflasi di Jawa Tengah tercatat sebesar 4.3%. Lalu inflasi terjadi kemerosotan yang lumayan besar pada tahun 2020 dan 2021 yakni sampai menjadi 1.46%. Kemudian pada tahun 2022, inflasi kembali meningkat pesat, hingga mencapai 4.39%. Namun pada tahun 2023, inflasi menunjukkan penurunan kembali di angka 3.8%. Secara keseluruhan, grafik di atas menunjukkan pergerakan inflasi yang cukup fluktuatif di Jawa Tengah dari tahun ke tahun. Hal itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti harga pangan, aktivitas ekonomi, dan ketika memasuki musim panen.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga menjadi penentu kesejahteraan sebuah keluarga. Kesejahteraan suatu rumah tangga pastinya tidak terlepas dari upah atau pendapatan keluarga. Menurut Persaulian (dalam Hidayat dkk, 2024) bahwa tenaga kerja menjadikan upah minimum sebagai patokan utama pendapatan mereka. Hal ini menarik jika dikaitkan dengan daerah yang upah minimumnya cukup terjadi ketimpangan di antara daerah-daerah sekitarnya. Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di Pulau Jawa yang saat ini memiliki Upah

Minimum Provinsi (UMP) terendah yang ditetapkan sebesar Rp2.169.349 untuk tahun 2025, yang mencerminkan kenaikan sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya, 2024.

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan kebijakan strategis yang berperan dalam menetapkan standar pengupahan di Indonesia. UMP (Upah Minimum Provinsi) adalah tingkat gaji terendah yang diterapkan di seluruh wilayah suatu provinsi dan ditetapkan gubernur yang didasarkan usulan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Penetapan besar atau kecilnya Upah Minimum Provinsi ini memiliki dampak terhadap tingkat produktivitas, kesempatan kerja, serta turut meningkatkan daya beli masyarakat. Melalui adanya upah minimum yang memadai, diharapkan kesejahteraan para pekerja dapat meningkat dan pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi meningkat juga (Diynta, 2023). Di Jawa Tengah, penetapan UMP didasarkan pada beberapa penyebab diantaranya tingkat inflasi, produktivitas serta pola konsumsi masyarakat. Berikut adalah grafik UMP tahun 2019-2023 di Jawa Tengah.

Gambar 1. 5 Grafik Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2019-2023)

Berdasarkan grafik 1.5, UMP dari tahun 2019-2023 di Jawa Tengah terlihat terjadi perkembangan yang stabil setiap tahunnya. Sebagaimana terlihat tahun 2019 ke tahun 2020, UMP tercatat sebanyak 1.605.396 menjadi 1.742.015. Lalu pada tahun 2020 sampai 2022, UMP Jawa Tengah terlihat tidak ada kenaikan yang signifikan yaitu hanya menjadi Rp 1.812.935. Namun kemudian, terjadi kenaikan yang cukup signifikan kembali pada tahun 2023 yaitu mencapai Rp 1.958.170. Ini menunjukkan adanya keberhasilan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan standar upah minimum bagi para pekerja.

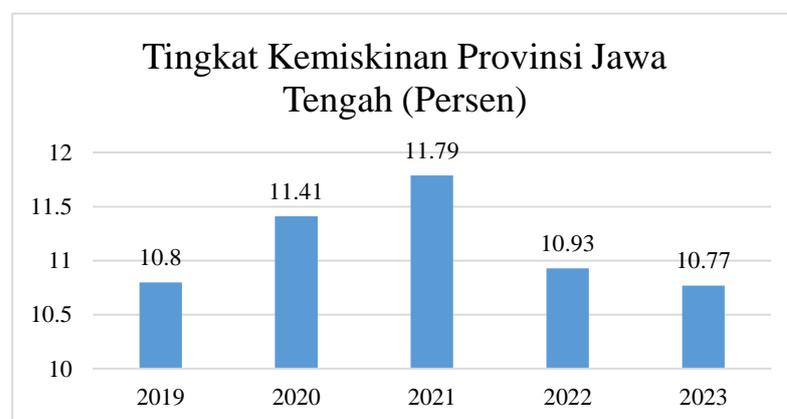
Disamping itu, salah satu peran penting dalam perekonomian Indonesia adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan menjadi fokus dan perhatian dalam pembangunan sosial ekonomi di berbagai negara. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat tidak dapat memperoleh sumber daya yang cukup untuk memenuhi tolak ukur hidup rata-rata di suatu wilayah. Akhirnya hal tersebut menuntut mereka untuk hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum (Rudy & Indah, 2021). Tingkat kemiskinan dapat diukur dan dilihat dari empat dimensi. Pertama, dari dimensi ekonomi yang menunjukkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pokok dan memperbaiki keadaan. Kedua, dari dimensi sosial yang mencakup ketidakmampuan dalam berperan aktif pada kegiatan sosial masyarakat. Ketiga, dari dimensi politik yang meliputi rendahnya akses terhadap sumber daya dan fasilitas yang disediakan oleh negara. Keempat, dari dimensi psikologi yang mencakup perasaan ketergantungan dan ketidakberdayaan.

Di Jawa Tengah, tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan yang krusial bagi pemerintah setempat. Hal tersebut dikarenakan banyak keluarga

pedesaan di Jawa Tengah yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan penghasilan yang tidak menentu. Di sisi lain, wilayah perkotaan juga tidak luput dari kemiskinan karena pemukiman padat penduduk di pinggiran kota besar seperti Semarang, Tegal, dan Surakarta dihuni oleh rumah tangga yang hidupnya pas-pasan, bekerja serabutan atau pedagang kecil dengan pendapatan minim.

Kemiskinan pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, diantaranya adalah kemiskinan absolut dilihat dari besarnya penghasilan serta bagaimana seseorang dapat mencukupi kebutuhan pokok serta dapat hidup dengan layak, lalu kemiskinan relatif yang terjadi karena ketimpangan sosial dimana seseorang sudah dapat mencukupi kebutuhan pokoknya tetapi kondisinya masih berada di bawah masyarakat sekitarnya (Rudy & Indah, 2020). Berikut adalah grafik tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2019-2023.

Gambar 1. 6 Grafik Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah (2019-2023)

Berdasarkan grafik tersebut, di Jawa Tengah tingkat kemiskinan menunjukkan sedikit fluktuasi pada periode 5 tahun akhir. Pada tahun 2019-2021 angka kemiskinan naik dari 10.80% menjadi 11.79%. Pandemi *covid-19* yang menyebabkan kenaikan tersebut sehingga mempengaruhi perekonomian dan mata

pencapaian masyarakat. Meski demikian, dalam periode 2022-2023 penurunan mulai terlihat hingga mencapai 10.77%. Ini merupakan capaian yang cukup baik dan signifikan, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk terus menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Penurunan yang konsisten tersebut mencerminkan efektivitas dari berbagai program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah, meskipun sempat mengalami tantangan selama masa pandemi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Provinsi Jawa Tengah sedang mengalami fenomena peningkatan, yaitu tren yang baik yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah besarnya pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB Jawa Tengah yang setiap tahunnya terus meningkat. Dampak dari berbagai variabel pengeluaran Jawa Tengah, termasuk menurunnya angka kemiskinan dan inflasi, serta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahunnya, tidak dapat dilepaskan dari peningkatan pengeluaran konsumen rumah tangga di Jawa Tengah. Dalam konteks penelitian ini, kebaruan terletak pada tahun dan tempat dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ahmad Soleh dkk. Penelitian tersebut berlatar di Provinsi Jambi menggunakan tahun 2008-2022, sedangkan penelitian ini berlatar di Provinsi Jawa Tengah menggunakan tahun 2010-2023.

Dari perspektif fenomena dan inovasi, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan dan dampak masing-masing variabel dengan judul **“Analisis Pengaruh Inflasi, Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, didapatkan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Jawa di Provinsi Tengah?
3. Apakah Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah.
3. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk mengatasi masalah yang disajikan dalam penelitian ini dengan tetap menjaga fokus, peneliti menetapkan batasan-batasan berikut untuk ruang lingkungannya:

1. Dalam melakukan penelitian ini, digunakan data time series selama 14 tahun dengan rentang waktu sejak 2010 hingga tahun 2023.

2. Data yang dipakai yaitu berupa data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
3. Variabel independen yang digunakan adalah Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Kemiskinan, sedangkan variabel dependen adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan oleh peneliti dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada berbagai pihak dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademi

Setelah selesainya penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca di masa mendatang, serta memudahkan pencarian bahan referensi dalam rangka melakukan penelitian.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan berharga bagi perumusan, estimasi, dan pengembangan kebijakan terkait Inflasi, Upah Minimum, dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan menjadi acuan dalam memahami dampak Inflasi, Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.